

Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat

Volume. 8, No. 1 Desember 2026

Penguatan Tata Kelola dan Literasi Keuangan Pelaku UMKM Kota Makassar melalui Pelatihan Berbasis SAK EMKM

Asmar¹, Fajriani Azis², Adriansyah³, Anisatun Humayrah Rais⁴, Yulia Yunita Yusuf⁵

^{1,2,3} Program Studi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar

^{4,5} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar

Korespondensi: asmaryunus@unm.ac.id

Received: 19 September 2026: Accepted: 10 October 2026

ABSTRAK

Sebagian besar pelaku usaha mikro di Indonesia bertahan pada skala yang sama dalam waktu lama bukan karena kurang bekerja keras, melainkan karena fondasi administrasi usahanya belum terbangun. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan pemahaman pelaku UMKM atas tata kelola usaha dan penyusunan laporan keuangan berbasis SAK EMKM, serta menautkan keduanya dengan peluang akses pembiayaan dan kemitraan. Kegiatan dilaksanakan bersama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar pada 22 September 2026 di Grand Maleo Hotel Makassar dan diikuti 100 pelaku UMKM yang bergerak pada bidang kuliner, kriya, dan jasa. Metode pelaksanaan mencakup sosialisasi kerangka regulasi, pelatihan berbasis kisah kasus dan ilustrasi laporan keuangan, penerapan teknologi berupa pengenalan alat bantu pencatatan berjenjang, pendampingan melalui kuis diagnostik dan latihan kelompok, serta penyusunan rencana aksi sebagai indikator ketercapaian. Evaluasi bersifat deskriptif kualitatif tanpa pengukuran pretest dan pascates. Hasil latihan dan respons peserta menunjukkan tiga hal. Pertama, hambatan utama peserta bukan motivasi, melainkan belum adanya pemisahan antara keuangan rumah tangga dan keuangan usaha. Kedua, peserta memahami laporan keuangan bukan sebagai kewajiban administratif, melainkan sebagai alat bukti yang dinilai lembaga keuangan dan calon mitra. Ketiga, seluruh peserta menyusun komitmen tertulis berjangka tujuh, tiga puluh, dan sembilan puluh hari. Kegiatan menyimpulkan bahwa tata kelola pada skala mikro paling tepat dioperasionalkan sebagai keterpisahan uang, peran, dan pengetahuan, bukan sebagai kelengkapan organ formal. Pendampingan lanjutan disarankan untuk mengawal pelaksanaan rencana aksi peserta.

Kata kunci: tata kelola usaha; SAK EMKM; UMKM naik kelas; literasi keuangan; pencatatan keuangan

Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat

Volume. 8, No. 1 Desember 2026

A. PENDAHULUAN

Usaha mikro, kecil, dan menengah menopang sebagian besar aktivitas ekonomi Indonesia. Sektor ini menyumbang sekitar 61 persen produk domestik bruto dan menyerap lebih dari 90 persen tenaga kerja nasional (Prestianawati dkk., 2025). Angka tersebut menempatkan UMKM bukan sebagai pelengkap perekonomian, melainkan sebagai penopang utamanya.

Besarnya jumlah tidak berbanding lurus dengan kemampuan bertumbuh. Struktur UMKM Indonesia tetap didominasi usaha berskala mikro, sementara perpindahan dari skala mikro ke skala kecil berlangsung sangat lambat. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menetapkan kriteria skala usaha berdasarkan hasil penjualan tahunan, yaitu sampai dengan dua miliar rupiah untuk usaha mikro, di atas dua sampai lima belas miliar rupiah untuk usaha kecil, dan di atas lima belas sampai lima puluh miliar rupiah untuk usaha menengah (Republik Indonesia, 2021). Perpindahan antarkriteria itulah yang lazim disebut naik kelas.

Penelitian dan kegiatan pengabdian terdahulu menunjukkan bahwa hambatan naik kelas bersifat administratif, bukan bersifat semangat. Pemahaman akuntansi dasar pelaku usaha masih terbatas sehingga transparansi dan keterukuran kinerja keuangan rendah (Rachmawati dkk., 2026). Pelaku usaha kesulitan memisahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha serta belum mampu menyusun laporan sesuai standar (Kristianto dkk., 2025). Bahkan usaha yang secara formal telah menerapkan standar akuntansi dapat gagal memenuhi asas kesatuan usaha karena harta pribadi dan harta usaha belum dipisahkan (Pessy dkk., 2025). Ketidadaan pemisahan tersebut membuat laba usaha tidak pernah terlihat dan modal usaha terpakai tanpa disadari.

Persoalan kedua menyangkut kelengkapan laporan. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah yang diterbitkan Ikatan Akuntan Indonesia mewajibkan tiga komponen laporan, yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018). Pendampingan pada usaha mikro menunjukkan bahwa penyusunan ketiga komponen tersebut dapat dicapai melalui pelatihan terstruktur (Azizah dkk., 2024; Patty dkk., 2025). Namun capaian itu menuntut pendampingan yang berkelanjutan, bukan sosialisasi tunggal (Nasihin dkk., 2025).

Persoalan ketiga menyangkut pemanfaatan laporan. Laporan keuangan kerap dipandang pelaku usaha sebagai kewajiban administratif, bukan sebagai alat pembuktian. Padahal laporan keuangan merupakan syarat yang dinilai lembaga pembiayaan dan calon mitra usaha. Penguatan manajemen keuangan yang dipadukan dengan pengurusan legalitas terbukti

Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat

Volume. 8, No. 1 Desember 2026

menaikkan literasi keuangan peserta sebesar 36 persen dan mengantarkan 68 persen peserta menyelesaikan pendaftaran Nomor Induk Berusaha dalam satu rangkaian kegiatan (Prestianawati dkk., 2025). Pencatatan berbasis SAK EMKM juga menaikkan pemahaman peserta dari 25 persen menjadi 90 persen dan kemampuan teknis menyusun laporan dari nol menjadi 85 persen (Watulfa & Fithria, 2025).

Dua peluang mutakhir memperkuat urgensi penguatan tata kelola. Pertama, adopsi pembayaran digital berbasis kode QR berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM melalui efisiensi transaksi, percepatan arus kas, dan kemudahan pencatatan (Utami, 2025). Setiap transaksi digital menghasilkan catatan otomatis yang dapat menjadi bahan pembukuan sekaligus rekam jejak usaha. Kedua, ketepatan perhitungan harga pokok menentukan kewajaran harga jual dan besaran laba (Triawanawati & Sarwono, 2025). Kedua peluang tersebut hanya dapat dimanfaatkan bila pelaku usaha memiliki kebiasaan mencatat.

Kegiatan pengabdian bidang UMKM selama ini lebih banyak berfokus pada salah satu sisi. Sebagian menyoroti keterampilan teknis pembukuan (Hasanah, 2025; Rismawati & Vauliyanti, 2025), sebagian menyoroti aspek operasional dan pengetahuan usaha (Budiarti & Firmansyah, 2024), dan sebagian lagi menyoroti pemahaman regulasi (Henny dkk., 2025). Kegiatan yang menyatukan tata kelola usaha, penyusunan laporan keuangan, dan pemanfaatannya untuk akses pembiayaan dalam satu rangkaian masih terbatas.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar menyelenggarakan Pelatihan Peningkatan Tata Kelola dan Kinerja Keuangan Koperasi dan UMKM sebagai jawaban atas kebutuhan tersebut. Tim pengabdian bertindak sebagai pemateri pada angkatan pertama. Tujuan kegiatan ada tiga. Pertama, meningkatkan pemahaman pelaku UMKM atas prinsip dan pilar tata kelola usaha pada skala mikro. Kedua, membekali peserta dengan kemampuan menyusun laporan keuangan sederhana sesuai SAK EMKM dan membaca indikator kesehatan usaha. Ketiga, menautkan tata kelola dan laporan keuangan dengan peluang pembiayaan, digitalisasi, dan kemitraan. Manfaat yang diharapkan berupa perubahan kebiasaan pengelolaan usaha yang dimulai sejak hari berikutnya setelah pelatihan.

B. METODE

Lokasi dan Sasaran Kegiatan

Kegiatan berlangsung pada Selasa, 22 September 2026, bertempat di Grand Maleo Hotel Makassar, Jalan Pelita Raya VIII Nomor 1, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Mitra kegiatan adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar selaku penyelenggara, berdasarkan undangan Kepala Dinas Nomor

Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat

Volume. 8, No. 1 Desember 2026

500.3/825/Diskop&UKM/IX/2026 dengan rujukan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021.

Sasaran kegiatan adalah 100 pelaku UMKM Kota Makassar yang tercantum dalam daftar undangan resmi, masing-masing diwakili satu orang. Komposisi peserta didominasi usaha bidang kuliner, meliputi produk olahan makanan ringan, kue dan roti, makanan beku, serta minuman. Kelompok berikutnya adalah usaha kriya, meliputi produk rajut, aksesoris, dan kerajinan tangan. Sisanya bergerak pada bidang jasa dan produk perawatan. Sebagian besar merupakan usaha berskala mikro yang dikelola sendiri oleh pemilik atau bersama anggota keluarga.

Karakteristik sasaran tersebut menentukan rancangan materi. Peserta bukan tenaga administrasi yang terlatih, melainkan pemilik sekaligus pelaksana harian usaha. Materi karena itu disusun dengan bahasa keseharian, contoh usaha yang dikenali peserta, dan ilustrasi angka yang dapat dihitung dengan kalkulator telepon genggam.

Tahapan Pelaksanaan

Sosialisasi. Tahap ini menyampaikan kerangka regulasi dan konsep dasar. Kriteria skala usaha dijelaskan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 agar peserta memahami arti naik kelas secara terukur. Konsep tata kelola usaha diperkenalkan melalui lima prinsip dasar, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Standar akuntansi diperkenalkan melalui SAK EMKM beserta komponen laporan yang diwajibkan.

Pelatihan. Materi disampaikan melalui ceramah terstruktur yang dibagi menjadi lima bagian, yaitu pilar tata kelola, keuangan dan laporan keuangan, jalur naik kelas, sesi interaktif, serta rencana aksi. Penyampaian dibuka dengan pertanyaan reflektif tentang omzet yang terasa besar namun laba tidak terlihat, lalu dilanjutkan dengan perbandingan dua usaha berskala sama yang berbeda nasib karena perbedaan tata kelola. Materi laporan keuangan disampaikan melalui ilustrasi laba rugi dan neraca sebuah usaha katering, lengkap dengan angka yang dapat ditelusuri peserta baris demi baris.

Penerapan teknologi. Alat bantu pencatatan diperkenalkan secara berjenjang agar peserta dapat memilih sesuai kesiapannya. Jenjang pertama berupa buku kas tulis tangan disertai map penyimpanan nota. Jenjang kedua berupa lembar kerja elektronik dengan rumus penjumlahan sederhana. Jenjang ketiga berupa aplikasi pencatatan keuangan pada telepon genggam. Peserta juga diperkenalkan pada pemanfaatan kode QR pembayaran sebagai sumber catatan transaksi otomatis, dengan syarat penerimaan diarahkan ke rekening usaha, bukan rekening pribadi.

Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat

Volume. 8, No. 1 Desember 2026

Pendampingan dan evaluasi. Pendampingan dilakukan melalui tiga instrumen. Instrumen pertama berupa lembar refleksi empat pertanyaan tentang kepemilikan Nomor Induk Berusaha, pembagian tugas tertulis, keberadaan prosedur operasional baku, dan keberlangsungan usaha ketika pemilik berhalangan. Instrumen kedua berupa kuis diagnostik sepuluh butir dengan penilaian mandiri yang mengelompokkan peserta ke dalam tiga kategori kesiapan. Instrumen ketiga berupa latihan kelompok menghitung laba kotor dan laba usaha sebuah warung kopi, sekaligus menandai transaksi yang bukan merupakan beban usaha. Evaluasi bersifat deskriptif kualitatif berdasarkan jawaban peserta, pola pertanyaan pada sesi tanya jawab, dan isi rencana aksi yang disusun.

Keberlanjutan program. Keberlanjutan dirancang melalui penyerahan templat pencatatan kepada peserta, pembentukan saluran komunikasi peserta untuk menampung pertanyaan lanjutan, dan usulan pendampingan berkala kepada dinas untuk mengawal pelaksanaan rencana aksi.

Indikator ketercapaian kegiatan. Kegiatan dinyatakan tercapai bila memenuhi tiga indikator. Pertama, peserta mampu membedakan omzet, laba kotor, laba usaha, dan laba bersih serta menandai pengeluaran yang bukan beban usaha. Kedua, peserta mampu menyebutkan minimal satu langkah tata kelola yang akan diperbaiki beserta alasannya. Ketiga, seluruh peserta menyusun rencana aksi tertulis berjangka tujuh, tiga puluh, dan sembilan puluh hari.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi: Tata Kelola sebagai Keterpisahan, Bukan Kelengkapan Organ

Hasil pertama bersifat konseptual. Peserta pada awalnya memahami tata kelola sebagai urusan perusahaan besar yang memiliki struktur organisasi berlapis. Pemahaman itu wajar karena istilah tata kelola lazim dikaitkan dengan dewan komisaris dan komite audit yang tidak relevan bagi usaha beranggota tiga sampai lima orang.

Sesi menerjemahkan lima prinsip tata kelola ke dalam wujud praktis yang dapat dikenali peserta sebagaimana disajikan pada Tabel 1. Penerjemahan ini mengubah tata kelola dari konsep normatif menjadi daftar tindakan.

Tabel 1. Penerjemahan Lima Prinsip Tata Kelola ke dalam Wujud Praktis Usaha Mikro

Prinsip	Wujud Praktis pada Usaha Mikro
Transparansi	Informasi usaha tercatat, tidak hanya tersimpan di kepala pemilik

Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat

Volume. 8, No. 1 Desember 2026

Akuntabilitas	Setiap orang mengetahui tugasnya dan dapat dimintai tanggung jawab
Responsibilitas	Patuh pada aturan perizinan, kewajiban pajak, dan standar produk
Independensi	Keputusan usaha diambil secara objektif, terpisah dari urusan pribadi
Kewajaran	Adil kepada karyawan, pemasok, mitra, dan pelanggan

Sumber: Materi pelatihan tim pengabdian (2026)

Sesi kemudian menyederhanakan seluruh prinsip tersebut ke dalam satu pertanyaan uji, yaitu apakah usaha tetap berjalan dengan benar apabila pemiliknya berhalangan selama satu minggu. Pertanyaan ini terbukti efektif. Sebagian besar peserta menjawab tidak, dan jawaban itu membuka kesadaran bahwa persoalan yang dihadapi bukan kekurangan modal melainkan ketergantungan usaha pada satu orang.

Temuan ini mengarah pada satu rumusan yang lebih tepat bagi skala mikro. Tata kelola pada usaha mikro paling tepat dioperasikan sebagai keterpisahan, bukan sebagai kelengkapan organ. Keterpisahan itu mencakup tiga hal, yaitu keterpisahan uang antara rumah tangga dan usaha, keterpisahan peran antara pemilik dan pelaksana, serta keterpisahan pengetahuan dari kepala pemilik menuju catatan tertulis. Ketiganya dapat dijalankan usaha beranggota tiga orang tanpa menambah struktur apa pun.

Pelatihan: Pemisahan Keuangan sebagai Hambatan Utama

Hasil kedua merupakan temuan lapangan yang paling menonjol. Ketika sesi membahas pemisahan uang usaha dan uang pribadi, respons peserta paling ramai. Peserta mengakui kebiasaan mengambil uang dari kas usaha untuk keperluan rumah tangga tanpa mencatatnya. Sebagian peserta baru menyadari bahwa pengambilan tersebut bukan beban usaha melainkan prive, sehingga selama ini laba usaha yang mereka hitung tidak pernah mencerminkan keadaan sebenarnya.

Temuan ini sejalan dengan hasil pendampingan terdahulu yang menempatkan ketidakmampuan memisahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha sebagai kendala utama pelaku UMKM (Kristianto dkk., 2025) dan dengan temuan bahwa asas kesatuan usaha kerap tidak terpenuhi meskipun pencatatan secara formal sudah berjalan (Pessy dkk., 2025). Kegiatan ini menambahkan satu penjelasan atas ketekunan masalah tersebut. Pemisahan keuangan sulit dijalankan bukan karena peserta tidak memahami konsepnya, melainkan karena belum ada mekanisme penggantinya. Selama pemilik tidak menetapkan gaji untuk dirinya sendiri, kas usaha akan tetap menjadi sumber belanja rumah tangga.

Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat

Volume. 8, No. 1 Desember 2026

Karena itu sesi menempatkan penetapan gaji pemilik sebagai pasangan wajib dari pemisahan rekening. Gaji pemilik diperlakukan sebagai beban usaha yang wajar dan konsisten, sehingga seluruh kebutuhan rumah tangga dibayar dari gaji tersebut, bukan dari kas usaha. Peserta menerima rumusan ini dengan cepat karena menjawab persoalan praktis yang mereka hadapi setiap hari.

Pelatihan: Laporan Keuangan SAK EMKM dan Empat Indikator Kesehatan Usaha

Materi laporan keuangan disampaikan melalui ilustrasi sebuah usaha catering dengan pendapatan bulanan empat puluh lima juta rupiah. Alur perhitungan ditelusuri bertahap dari pendapatan dikurangi harga pokok penjualan menjadi laba kotor, dikurangi beban operasional menjadi laba usaha, lalu dikurangi bunga dan pajak menjadi laba bersih. Ilustrasi neraca disajikan berpasangan untuk menunjukkan hubungan antara aset, liabilitas, dan ekuitas.

Tiga hal paling sering terlewat oleh peserta terungkap pada sesi ini. Pertama, gaji pemilik tidak dihitung sebagai beban usaha. Kedua, penyusutan peralatan tidak dibebankan secara berkala. Ketiga, pengambilan uang rumah tangga diperlakukan sebagai beban, bukan sebagai prive. Ketiga kekeliruan tersebut sama-sama membuat laba tampak lebih besar daripada keadaan sebenarnya. Komponen laporan yang diwajibkan SAK EMKM beserta kegunaan praktisnya bagi peserta disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Komponen Laporan Keuangan SAK EMKM dan Kegunaannya bagi Pelaku UMKM

Komponen Laporan	Status	Kegunaan Praktis bagi Pelaku Usaha
Laporan posisi keuangan	Wajib	Menunjukkan apa yang dimiliki dan apa yang ditanggung usaha
Laporan laba rugi	Wajib	Menjawab apakah usaha benar-benar memperoleh laba
Catatan atas laporan keuangan	Wajib	Memuat profil usaha dan kebijakan akuntansi yang dipakai
Laporan arus kas	Disarankan	Memantau kemampuan usaha membayar gaji dan belanja bahan

Sumber: SAK EMKM (IAI, 2018), diolah

Sesi kemudian memperkenalkan empat indikator kesehatan usaha yang dapat dihitung dengan kalkulator telepon genggam, yaitu margin laba kotor, margin laba bersih, perbandingan utang terhadap ekuitas, dan daya tahan kas. Penekanan diberikan pada

Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat

Volume. 8, No. 1 Desember 2026

pembacaan tren antarbulan, bukan pada angka satu bulan. Pendekatan ini dipilih karena peserta memerlukan alat yang dapat dipakai sendiri tanpa bantuan tenaga akuntansi.

Satu penegasan penting disampaikan pada bagian ini, yaitu bahwa laba tidak sama dengan uang tunai. Ilustrasi menunjukkan usaha yang membukukan laba namun sebagian besar labanya masih berupa piutang pelanggan. Penegasan ini menjawab keluhan yang paling sering muncul di awal sesi, yaitu usaha terasa ramai tetapi uangnya tidak kelihatan.

Penerapan Teknologi dan Jalur Naik Kelas

Peserta menerima pengenalan alat bantu pencatatan berjenjang dengan respons yang beragam sesuai kesiapan masing-masing. Peserta yang belum pernah mencatat memilih jenjang buku kas tulis tangan. Peserta yang sudah terbiasa menggunakan telepon pintar tertarik pada jenjang lembar kerja elektronik dan aplikasi. Penyampaian berjenjang ini penting agar peserta tidak merasa tertinggal. Prinsip yang ditekankan adalah bahwa alat terbaik bukan yang paling canggih, melainkan yang benar-benar dipakai setiap hari.

Pemanfaatan kode QR pembayaran dibahas bukan sebagai alat penerimaan uang semata, melainkan sebagai instrumen tata kelola. Setiap transaksi tercatat otomatis beserta tanggal, waktu, dan jumlahnya, sehingga menjadi bahan pembukuan sekaligus rekam jejak usaha. Pembahasan ini didukung bukti bahwa adopsi pembayaran digital berbasis kode QR berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan UMKM melalui efisiensi transaksi dan kemudahan pencatatan (Utami, 2025). Syarat yang ditekankan adalah pengarahannya penerimaan ke rekening usaha, karena jejak digital hanya bernilai bila terpisah dari transaksi pribadi.

Bagian jalur naik kelas menautkan seluruh materi sebelumnya dengan peluang konkret. Legalitas diposisikan sebagai tiket masuk menuju pembiayaan perbankan, lokapasar besar, pengadaan pemerintah, kemitraan usaha besar, dan pasar ekspor. Laporan keuangan diposisikan sebagai alat bukti yang menggantikan cerita lisan ketika mengajukan pembiayaan. Penautan ini mengubah kedudukan materi administrasi di mata peserta, dari beban menjadi sarana. Pergeseran serupa juga dilaporkan pada kegiatan yang memadukan penguatan manajemen keuangan dengan pengurusan legalitas usaha (Prestianawati dkk., 2025).

Pendampingan: Kuis Diagnostik dan Latihan Kelompok

Kuis diagnostik sepuluh butir berfungsi sebagai cermin, bukan sebagai ujian. Butir yang paling banyak dijawab belum adalah kepemilikan laporan laba rugi bulanan, pengetahuan atas laba bersih bulan sebelumnya, penetapan gaji untuk diri sendiri, dan pengetahuan atas harga pokok setiap produk. Sebaliknya, butir yang paling banyak dijawab sudah adalah

Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat

Volume. 8, No. 1 Desember 2026

kepemilikan Nomor Induk Berusaha. Pola ini menunjukkan bahwa urusan legalitas relatif lebih tertangani dibandingkan urusan pencatatan.

Latihan kelompok menghitung laba sebuah warung kopi menghasilkan diskusi paling hidup. Dua transaksi sengaja disisipkan sebagai penguji, yaitu pembelian mesin kopi baru dan pengambilan kas untuk biaya sekolah anak. Sebagian kelompok pada awalnya memasukkan keduanya sebagai beban usaha. Melalui diskusi, peserta menyimpulkan bahwa pembelian mesin merupakan penambahan aset yang dibebankan bertahap melalui penyusutan, sedangkan pengambilan kas untuk keperluan keluarga merupakan prive yang mengurangi ekuitas. Kekeliruan yang terjadi pada latihan ini justru menjadi bahan pembelajaran paling efektif karena peserta menemukannya sendiri.

Luaran Kegiatan dan Ketercapaian Indikator

Ketiga indikator ketercapaian terpenuhi pada tingkat keterlaksanaan kegiatan. Ketercapaian ini menggambarkan kemampuan yang ditunjukkan peserta selama sesi, bukan dampak program terhadap kinerja keuangan usaha, yang memerlukan data dasar dan pengukuran lanjutan. Peserta mampu membedakan omzet, laba kotor, laba usaha, dan laba bersih serta menandai pengeluaran yang bukan beban usaha melalui latihan kelompok. Peserta mampu menyebutkan langkah tata kelola yang akan diperbaiki, dengan pemisahan rekening usaha sebagai jawaban terbanyak. Seluruh peserta menyusun rencana aksi tertulis sebagaimana kerangkanya disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Kerangka Rencana Aksi Tujuh, Tiga Puluh, dan Sembilan Puluh Hari

Jangka Waktu	Butir Rencana Aksi Peserta
Tujuh hari	Membuka rekening khusus usaha; memulai buku kas harian; menetapkan gaji pemilik; menyiapkan map penyimpanan nota
Tiga puluh hari	Mengurus atau memverifikasi Nomor Induk Berusaha; menulis satu prosedur operasional inti; membuat pembagian tugas tertulis; menyusun laporan laba rugi bulan pertama
Sembilan puluh hari	Menyusun laporan keuangan tiga bulan; menghitung empat indikator kesehatan usaha; melengkapi izin dan sertifikasi produk; menyiapkan rencana pembiayaan atau kemitraan

Sumber: Luaran komitmen peserta (2026)

Rencana aksi disusun berjenjang agar peserta tidak kewalahan. Jangka tujuh hari berisi tindakan yang dapat dilakukan segera tanpa biaya. Jangka tiga puluh hari berisi tindakan yang

Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat

Volume. 8, No. 1 Desember 2026

memerlukan persiapan administratif. Jangka sembilan puluh hari berisi tindakan yang menuntut akumulasi catatan selama tiga bulan. Penjenjangan ini sejalan dengan temuan bahwa pendampingan bertahap menghasilkan capaian yang lebih terukur dibandingkan penyampaian materi sekaligus (Nasihin dkk., 2025; Watulfa & Fithria, 2025). Dokumentasi pelaksanaan kegiatan disajikan pada Gambar 1 dan Gambar 2.



Gambar 1. Penyampaian materi tata kelola usaha dan laporan keuangan kepada pelaku UMKM Kota Makassar, 22 September 2026



Gambar 2. Produk peserta dari bidang kuliner dan kriya yang ditampilkan pada kegiatan

Kendala Pelaksanaan

Tiga kendala muncul selama pelaksanaan. Pertama, jumlah peserta yang mencapai seratus orang membatasi kedalaman pendampingan individual, sehingga latihan dilakukan secara berkelompok. Kedua, sebagian peserta belum membawa catatan keuangan usahanya sehingga latihan bertumpu pada kasus yang disiapkan tim. Ketiga, evaluasi tidak memakai pengukuran pratest dan pascates berskala karena keterbatasan waktu sesi, sehingga besaran peningkatan pemahaman tidak terukur secara kuantitatif. Ketiga kendala ini menjadi bahan perbaikan bagi angkatan berikutnya.

Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat

Volume. 8, No. 1 Desember 2026

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian ini memberikan penguatan pemahaman kepada 100 pelaku UMKM Kota Makassar mengenai tata kelola usaha dan penyusunan laporan keuangan berbasis SAK EMKM, serta menautkan keduanya dengan peluang pembiayaan, digitalisasi, dan kemitraan. Hasil latihan dan respons peserta menunjukkan pemahaman terhadap konsep tata kelola dan pengelolaan keuangan yang diperkenalkan selama pelatihan, meskipun besaran peningkatannya belum terukur secara kuantitatif. Hambatan utama peserta bukan motivasi, melainkan belum adanya pemisahan antara keuangan rumah tangga dan keuangan usaha, yang berakar pada ketiadaan gaji pemilik sebagai mekanisme pengganti.

Kebaruan kegiatan terletak pada perumusan tata kelola yang sesuai skala mikro. Tata kelola pada usaha mikro paling tepat dioperasionalkan sebagai keterpisahan uang, peran, dan pengetahuan, bukan sebagai kelengkapan organ formal. Rumusan ini dapat dijalankan usaha beranggota tiga orang tanpa menambah struktur apa pun. Manfaat bagi masyarakat berupa komitmen perubahan kebiasaan pengelolaan usaha yang dituangkan dalam rencana aksi tertulis. Kontribusi teoretik kegiatan terletak pada penegasan bahwa penguatan literasi keuangan UMKM perlu disertai mekanisme pengganti yang konkret, karena pengetahuan saja tidak cukup mengubah kebiasaan yang berakar pada kebutuhan rumah tangga.

Tiga saran diajukan. Pertama, pendampingan lanjutan pada bulan pertama dan ketiga untuk mengawal pelaksanaan rencana aksi peserta, karena tahap paling rawan adalah saat kebiasaan baru belum terbentuk. Kedua, penyelenggaraan kelas lanjutan dengan jumlah peserta lebih kecil agar pendampingan penyusunan laporan dapat dilakukan berbasis catatan usaha masing-masing. Ketiga, penerapan pengukuran pretest dan pascates pada angkatan berikutnya agar besaran peningkatan pemahaman dapat diukur dan dibandingkan antarangkatan, disertai pengumpulan data dasar dan data akhir atas indikator kinerja keuangan peserta, seperti omzet, laba, dan arus kas, agar dampak program dapat dinilai.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian menyampaikan terima kasih kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar atas kepercayaan sebagai pemateri pada kegiatan ini, kepada seluruh peserta pelaku UMKM Kota Makassar atas partisipasi aktif selama kegiatan berlangsung, serta kepada institusi asal para penulis atas dukungan kelembagaan.

Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat

Volume. 8, No. 1 Desember 2026

F. DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, D. N., Maharani, A. N. D., Putri, A., Pebriyanti, A. N., Toha, S., & Rahayuningsih, S. (2024). Penyusunan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil dan menengah (SAK-EMKM): Studi kasus pada UMKM Jeje Collection. *JURA: Jurnal Riset Akuntansi*, 2(3), 27-37.
- Budiarti, I., & Firmansyah, D. (2024). Peningkatan operasional yang efektif bagi UMKM: Praktik knowledge management, implementasi di Umy Lemon Sukabumi. *Jurnal Pengabdian Multidisiplin*, 4(3), 1-14.
- Hasanah, A. N. (2025). Peningkatan kemampuan menyusun laporan keuangan melalui kelas pelatihan komputer akuntansi bagi pelajar di Kota Serang. *Jurnal Pengabdian Vokasi*, 4(2), 8-14.
- Hasanah, A. N., Sukiyaningsih, T. W., Agnia, I. L., Rifaldi, I., Juwita, S., & Hasanah, S. A. (2024). Study action: Peningkatan literasi akuntansi siswa otomatisasi dan tata kelola perkantoran. *KUAT: Keuangan Umum dan Akuntansi Terapan*, 6(1), 56-64.
- Henny, Earlyanti, L., & Cruise, J. (2025). Edukasi perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 bagi pegawai tetap menggunakan tarif efektif rata-rata. *Jurnal Serina Abdimas*, 3(2), 583-590.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2018). Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. Jakarta.
- Kristianto, G. B., Istiningrum, F., & Saraswati, E. (2025). Sosialisasi dan pelatihan penyusunan laporan keuangan kepada UMKM di Kabupaten Banyumas. *ARDHI: Jurnal Pengabdian dalam Negeri*, 3(2), 32-42.
- Nasihin, I., Purwandari, D., Sumarni, N., Prawatiningsih, D., & Kartika, E. (2025). Pendampingan pengelolaan keuangan UMKM melalui penggunaan aplikasi akuntansi digital berbasis SAK EMKM. *JE: Journal of Empowerment*, 6(1), 1-11.
- Patty, M. A., Muslimin, U. R., Tandililing, E. M., Arjuna, B. J. P., Giovania, G., Sully, R. R., & Mudassir, A. F. (2025). Pencatatan keuangan sederhana berbasis SAK-EMKM pada usaha mikro kecil dan menengah di Kampung Yoka dan Padang Bulan. *Celebes Journal of Community Services*, 4(1), 183-193.

Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat

Volume. 8, No. 1 Desember 2026

- Pessy, P. T., Utama, I. B. M., & Sari, I. G. A. N. (2025). Analisis penerapan akuntansi pada usaha alat tulis kantor di Alfapro Stationery. *Jurnal Kendali Akuntansi*, 3(2), 1-12.
- Prestianawati, S. A., Syafitri, W., Tamin, A. K. A., & Fawwaz, M. (2025). Pemberdayaan UMKM untuk keberlanjutan usaha melalui penguatan manajemen keuangan, operasional, dan legalitas (NIB). *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat*, 6(2), 339-347. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v6i2.23402>
- Rachmawati, W., Karim, A., Krisnawati, H., Iqbal, M., & Bukhori, I. (2026). Peningkatan kualitas pencatatan keuangan UMKM melalui literasi akuntansi sederhana di Kelurahan Tlogosari Kulon, Kota Semarang. *Jurnal Vokasi*, 10(2), 201-211.
- Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Rismawati, & Vauliyanti, V. (2025). Edukasi standar akuntansi untuk meningkatkan literasi akuntansi siswa di SMKN 6 Kota Serang. *Journal of Innovation and Sustainable Empowerment*, 4(3), 142-148. <https://doi.org/10.25134/jise.v4i3.180>
- Trianawati, S. M., & Sarwono, A. E. (2025). Perhitungan harga pokok produksi pada UMKM Surakarta. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer*, 8(2), 30-40.
- Utami, N. (2025). Adopsi pembayaran digital melalui QRIS dan dampaknya terhadap kinerja finansial UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Transaksi*, 17(1), 1-15.
- Watulfa, D. C., & Fithria, A. (2025). Optimalisasi pencatatan keuangan UMKM berbasis SAK EMKM untuk mendorong kemandirian finansial. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat*, 6(2), 592-602.